

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan semua aspek bidang kehidupan semakin mudah, praktis, efektif dan efisien. Bidang perekonomian misalnya, mempermudah dalam melakukan berbagai kerjasama antar negara. Baru-baru ini ASEAN menyelenggarakan pertemuan antar negara-negara ASEAN yang disebut ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-9 di Brunei Darussalam. Pertemuan AECC dihadiri oleh 10 perwakilan kementerian negara se-ASEAN. Pertemuan itu digelar untuk membahas persiapan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) di 2015 dan persiapan KTT ASEAN ke-22 yang akan dilaksanakan pada 24-25 April 2013. ASEAN Economic Community 2015 akan membawa arus besar globalisasi di segala bidang. Hukum yang berlaku secara global tidak hanya free flow of services, tetapi juga free flow of people.

ASEAN Community sendiri berisi komitmen pengintegrasian tiga sektor utama, antara lain ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Sejatinya, banyak kalangan sangsi bahwa Indonesia akan mampu menghadapi rencana pengintegrasian kawasan ASEAN menjadi satu komunitas tunggal (Asean Community). Masih terbengkalainya penyediaan sarana infrastruktur, lemahnya

daya saing, serta ketergantungan terhadap barang impor menjadi beberapa alasan utama. Tentunya dalam menghadapi keadaan seperti ini, Indonesia perlu berbenah dalam membangun dan mengokohkan tiang-tiang perekonomiannya yang idealnya ditopang oleh kemampuan para pengusaha UMKM.

Tak bisa dipungkiri, pajak sebagai mesin penghasil uang negara telah menjadi primadona penerimaan negara, selain penerimaan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan, yang tentunya memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar yang tercermin dalam jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih belum memenuhi target dan tax ratio pajak yang optimal, dengan tax ratio Indonesia 12,87% (Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak, KemenKeu, mengatakan tax ratio Indonesia berdasarkan perhitungan internasional yang digunakan Organisasi Kerja Sama Pengembangan Ekonomi – OECD) masih sangat kecil bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH)

Awal 2007, Direktorat Jenderal Pajak gencar memperluas basis pajak melalui program ekstensifikasi. Tujuannya, memperbanyak jumlah pembayar pajak. Penambahan jumlah pembayar pajak itu ditandai dengan bertambahnya

jumlah warga negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan dua program ekstensifikasi secara bersamaan, yakni memodernisasi Kantor Pelayanan Pajak dan memperkenalkan *e-Registration* melalui internet.

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (*e-Registration*) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

e-Registration merupakan salah satu layanan yang memberikan kemudahan terhadap Wajib Pajak guna mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran NPWP secara online, Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak, cukup dilakukan melalui komputer yang mempunyai jaringan internet dimanapun, kemudian mengirimkan *softcopy* dokumen pendukung yang dibutuhkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan hanya perlu menunggu kartu NPWP disampaikan ke alamat Calon Wajib Pajak.

Situs resmi DJP, www.pajak.go.id telah hadir sejak tahun 1999 dan sudah dikembangkan hingga saat ini dari segi tampilan, layanan informasi yang diberikan, maupun teknologi yang digunakan. Perubahan terus dilakukan agar

dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan informasi Wajib Pajak. Penyempurnaan terus dilakukan guna memudahkan masyarakat, khususnya Wajib Pajak untuk mengakses informasi perpajakan yang terbaru. Pengembangan dilakukan secara kontinyu baik *layout* maupun konten situs yang mampu menarik minat masyarakat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah pengunjung situs tersebut dari waktu ke waktu. Bahkan pada saat pelaporan SPT di bulan Maret 2013 jumlah pengunjung mencapai lebih dari seratus ribu per hari.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying merupakan salah satu unit instansi vertikal Departemen Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Salah satu seksi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yaitu Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak serta melakukan kerja sama perpajakan. Berdasarkan uraian di atas dan hasil peninjauan langsung pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, maka penulis menyusun laporan kerja praktek ini dengan judul **“Analisis Pengaplikasian Sistem Administrasi Perpajakan Modern (Electronic Registration yang selanjutnya disebut E-reg) Pada Seksi Pelayanan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.”**

1.2 Tujuan Kerja Peraktek

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
- Untuk mengetahui peranan kualitas sistem administrasi perpajakan modern yang sedang berjalan pada Seksi Pelayanan di KPP Pratama Bandung Cibeunying
- Untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem administrasi perpajakan modern pada Seksi Pelayanan di KPP Pratama Bandung Cibeunying

1.3 Kegunaan Kerja Peraktek

Kerja Praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun kegunaan dari Kerja Praktek ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan baik teori maupun praktek
 - b. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari hasil pendidikan di bangku kuliah.
 - c. Mendapat pengalaman baru di dunia kerja terutama di bidang Sistem Administrasi Perpajakan Modern (*E-Registration*)

2. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai sarana untuk mempromosikan citra KPP Pratama Bandung Cibeunying
- b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam pengaplikasian sistem administrasi perpajakan modern

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi yang bermanfaat dalam rangka mengetahui bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan NPWP secara *online*

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Peraktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying di Jl. Purnawarman No. 21 Kotak Pos 112. Adapun jadwal atau jam dilakukannya Kerja praktek yaitu pada tanggal 22 Agustus 2013 s.d 23 September 2013. Hari dilaksanakannya Kerja praktek dari hari Senin s.d Jumat pada pukul 07.30 s.d 16.30.

Tabel 1.1
Waktu dan Penulisan Kerja Praktek

NO	Kegiatan	Waktu			
		Juli	Agustus	September	Okttober
1	Pengajuan Kerja Praktek				
2	Pelaksanaan Kerja Praktek				
3	Pengambilan Data				
4	Penulisan Laporan				